KPU KAB. PADANG PARIAMAN

(656141)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Laporan Keuangan

UADITED TAHUN 2024

JALAN PADANG BARU NO. 11 PARIT MALINTANG

E-MAIL : padangpariamankab.kpu@gmail.com

KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN (656141)

LAPORAN KEUANGAN AUDITED TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. LaporanKeuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akun tabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum KabupatenPadang Pariaman. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pariaman Malintang, Januari 2025
Sekretaris,

Ires Natalia Situmorang
NIP. 198412032009022012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
PernyataanTanggung Jawab		iii
Ringkasan		1
I.	Laporan Realisasi Anggaran	1
II.	Neraca	1
III.	Laporan Operasional	1
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	2
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	2
	A. Penjelasan Umum	10
	B. Penjelasan atas Pos-Pos LaporanRealisasi Anggaran	24
	C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	34
	D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	53
	E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	62
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	64

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Jl. Korong Padang Baru No. 11 Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung
Telp / Faximile (0751) 675354

PERNYATAANTANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Parit Malintang, Januari 2025

Sekretaris,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SEKRETARIAT

Tres Natalia Situmorang

NIP. 198412032009022012

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 DESEMBER 2024 AUDITED.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 AUDITED adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 0,- Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 AUDITED adalah sebesar Rp. 82.786.527.104,-atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 83.809.302.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 DESEMBER 2024 AUDITED. Nilai Aset per 31 DESEMBER 2024 AUDITED dicatat dan disajikan sebesar Rp. 6.759.764.962,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 2.570.330.426,-, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0,-, Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 4.189.434.536,-, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0,-.Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 6.649.964.962,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 DESEMBER 2024 AUDITED adalah sebesar Rp. 0,- , sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 85.755.299.552,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai

Rp. (85.755.299.552,-). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 9.950.000,- dan sebesar Rp. (85.745.349.552),- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (85.745.349.552,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 DESEMBER 2024 AUDITED adalah sebesar Rp. 5.576.154.934,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (85.745.349.552,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 86.819.159.580,- dan Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar Rp. 1.183.610.028,- sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 DESEMBER 2024 AUDITED adalah senilai Rp. 6.759.764.962,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 DESEMBER 2024 AUDITED disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember AUDITED Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Pendapatan Penerimaan Negara	A.1	-	-	0,00	925.000
JUMLAH PENDAPATAN		**-**	**-**	**0,00**	**925.000**
BELANJA	**B.2.**				
Belanja Pegawai	B.3	3.070.760.000	2.979.120.569	97,02	2.684.997.844
Belanja Barang	B.4	80.573.442.000	79.642.406.535	98,84	22.706.862.964
Belanja Modal	B.5	165.100.000	165.000.000	99,94	338.181.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		**83.809.302.000**	**82.786.527.104**	**98,78**	**25.730.041.808**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan AUDITED

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 31 DESEMBER 2023 AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas lainnya dan Setara Kas	C.1	2.401.580.426	-
Belanja Dibayar di Muka	C.2	168.750.000	393.750.000
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.3	-	-
Persediaan	C.4	-	977.884.747
Jumlah Aset Lancar		2.570.330.426	1.371.634.747
ASET TETAP			
Tanah	C.5	2.266.279.000	2.266.279.000
Peralatan dan Mesin	C.6	2.994.325.450	2.711.375.450
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.7	-	-
Gedung dan Bangunan	C.8	1.616.544.000	1.616.544.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.9	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.10	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.11	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.12	(2.687.713.914)	(2.389.678.263)
Jumlah Aset Tetap		4.189.434.536	4.204.520.187
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.13	-	-
Aset Lain-Lain	C.14	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.15	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		**6.759.764.962**	**5.576.154.934**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.16	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga I	C.17	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.18	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.19	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.20	6.759.764.962	5.576.154.934
JUMLAH EKUITAS		6.759.764.962	5.576.154.934

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan AUDITED

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.979.120.569	2.673.361.844
Beban Persediaan	D.3	3.540.445.092	35.478.650
Beban Barang dan Jasa	D.4	73.165.630.645	20.353.514.276
Beban Pemeliharaan	D.5	115.965.489	279.385.032
Beban Perjalanan Dinas	D.6	5.656.102.106	1.275.949.007
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	298.035.651	233.126.626
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		**85.755.299.552**	**24.850.815.435**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN		**(85.755.299.552)**	**(24.850.815.435)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		9.950.000	925.000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		9.950.000	925.000
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan			
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON		9.950.000	925.000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(85.745.349.552)**	**(24.849.890.435)**
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**(85.745.349.552)**	**(24.849.890.435)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	5.576.154.934	4.087.372.013
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(85.745.349.552)	(24.849.890.435)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	109.800.000	-
JUMLAH		**109.800.000**	**-**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	86.819.159.580	26.338.673.356
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	1.183.610.028	1.488.782.921
EKUITAS AKHIR	E.6	**6.759.764.962**	**5.576.154.934**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Komisi Pemilihan Umum Padang Pariaman

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Pelaporan Keuangan No. 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Entitas berkedudukan di Jalan Padang Baru No. 11 Parit Malintang.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen dengan visi ***"Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia "***.Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum.
- Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

adil,akuntabel, edukatif dan beradab.

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
- Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokrasi.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan AUDITED Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan AUDITED Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh

suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset

a. Aset Lancar

Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan	50%

	pelunasan	
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

  a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

  b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama

dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi

penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	**Masa Manfaat (tahun)**
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar

nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  a. Kewajiban Jangka Pendek
     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang
     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran

Satuan Kerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman memperoleh Alokasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 83.809.302.000,- selama Tahun 2024, dilakukan revisi DIPA awal satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang disebabkan adanya Refocussing, penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran Awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikuit ini :

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	**-**	**-**
Belanja		
Belanja Pegawai	2.893.116.000	3.070.760.000
Belanja Barang	12.417.943.000	80.573.442.000
Belanja Modal	0	165.100.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	**15.311.059.000**	**83.809.302.000**

Realisasi Pendapatan Rp. 0,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 DESEMBER 2024 AUDITED dan 31 DESEMBER 2023 AUDITED adalah sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang tidak ditetapkan sebesar Rp. 925.000,-. Pendapatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari Pendapatan dari Pemindatanganan BMN lainnya ,Pengembalian Belanja Makan PNS, Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas dan Perimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Ja	-	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	-	-	
Penerimaan Kembali	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Belanja Makan PNS, Belanja Perjalanan Dinas dan Perimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	0,00
Pendapatan dari Pemindahantanganan BMN Lainnya	-	-	#DIV/0!
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional lainnya	-	925.000	0,00
Jumlah	**-**	**925.000**	0,00

Realisasi Belanja Negara Rp. 82.786.527 .104,-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Instansi pada TA 2024 AUDITED adalah sebesar Rp. 82.786.527.104,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 AUDITED adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024 AUDITED

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.070.760.000	2.979.120.569	97,02
Belanja Barang	80.573.442.000	79.642.406.535	98,84
Belanja Modal	165.100.000	165.000.000	99,94
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	**83.809.302.000**	**82.786.527.104**	98,78
Pengembalian		-	-
Jumlah	**83.809.302.000**	**82.786.527.104**	98,78

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 DESEMBER 2024 AUDITED mengalami kenaikan 99.68% Dibandingkan dengan Periode 31 Desember 2023 AUDITED. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya Belanja Pegawai Satker KPU Kab Padang Pariaman dikarenakan kekurangan Gaji PNS dan PPNPN Komisioner KPU Kabupaten Padang Pariaman
2. Meningkatnya belanja operasional Badan Adhoc untuk mendukung Tahapan Pilkada Tahun 2024 dan perkantoran agar tetap dapat terlaksananya kegiatan dengan baik.
3. Penambahan belanja barang dan Modal untuk tahun 2024, untuk kantor KPU Kabupaten Padang pariaman.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 AUDITED dan TA 2023 AUDITED

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.979.129.569	2.684.997.844	10,95
Belanja Barang	79.642.406.535	22.706.862.964	250,74
Belanja Modal	165.000.000	338.181.000	(51,21)
Belanja Bantuan Sc	-	-	-
Jumlah	**82.786.536.104**	**25.730.041.808**	**221,75**

Belanja ***B.3 Belanja Pegawai***

Pegawai Rp. 2.979.129. 569-

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 2.979.129.559,- dan Rp. 2.684.997.844,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai PPNPN Komisioner KPU Kabupaten Padang Pariaman yang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 AUDITED mengalami Kenaikan sebesar 2,94 % dari TA 2023 AUDITED. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya kenaikan pangkat pegawai.
2. Adanya kenaikan berkala pegawai.
3. Adanya kenaikan Gaji dan Penambahan Pegawai PPPK

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Tunjangan PNS	2.107.824.619	1.879.127.344	12,17
Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja uang kehorma	871.304.950	805.870.500	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Kotor	**2.979.129.569**	**2.684.997.844**	**10,95**
Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	**2.979.129.569**	**2.684.997.844**	**10,95**

Belanja Barang Rp. 79.642.40 6.535 ,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2024 AUDITED dan TA 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 79.642406.535- dan Rp. 22.706.862.964,- Realisasi Belanja Barang TA 2024 AUDITED mengalami kenaikan (100%) dari Realisasi Belanja Barang TA 2023 AUDITED. Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan belanja barang operasional badan Adhoc, belanja barang non operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja barang persediaan

untuk Pemilihan Kepala Daerah bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman tahun 2024.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	34.161.864.631	188.056.500	########
Belanja Barang Non Operasional	35.699.049.375	19.903.648.337	79,36
Belanja Jasa	3.096.218.167	656.859.439	371,37
Belanja Pemeliharaan	115.965.489	279.385.032	(58,49)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.656.102.106	1.275.949.007	343,29
Belanja Barang Persediaan	931.508.295	404.264.649	130,42
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**79.660.708.063**	**22.708.162.964**	**250,80**
Pengembalian Belanja	(18.301.528)	(1.300.000)	
Jumlah Belanja	**79.642.406.535**	**22.706.862.964**	**250,74**

Belanja Modal Rp. 165.000.000-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 165.000.000,- dan Rp. 338.181.000,- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 AUDITED mengalami kenaikan dengan TA 2024 AUDITED yaitu 100 %, dibandingkan TA 2023 AUDITED disebabkan oleh penambahan Peralatan dan Mesin Laptop dan Printer untuk menunjang pelaksanaan Pilkada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan perkantoran.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.000.000	338.181.000	(51,21)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal BLU	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	**165.000.000**	**338.181.000**	(51,21)
Pengembalian	-	-	#VALUE!
Jumlah Belanja	**165.000.000**	**338.181.000**	(51,21)

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Periode yang berakhir 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Realisasi TA 2024 AUDITED tidak ada kenaikan dan penurunan karena Kantor Komisi Pemilihan Umum kabupaten Padang Pariaman tidak melakukan pembelian tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**0,00**
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**0,00**

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 AUDITED adalah sebesar Rp. Rp. 165.000.000,- dan Rp. 338.181.000,-.Hal ini disebabkan oleh pengadaan Laptop dan Printer peralatan dan mesin sebagai fasilitas perbandingan Realisasi Belanja dan Mesin TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit	0	0	#DIV/0!
Peralatan Komputer	0	0	#DIV/0!
Carrier Current aud	0	3.900.000	(100,00)
Finger Printer Time	4.950.000	3.099.000	59,73
LCD Projector/Infoc	0	9.760.000	(100,00)
A.C Split	0	25.830.000	(100,00)
Voice Recorder	0	6.467.500	(100,00)
Camera Digital	0	6.750.000	(100,00)
Camera Conference	0	1.950.000	(100,00)
Telephone Mobile	0	7.200.000	(100,00)
Televisi	13.500.000	4.129.200	226,94
Kamera Digital	0	34.950.000	(100,00)
P.C Unit	0	64.650.000	(100,00)
Lap Top	112.800.000	123.301.000	(8,52)
Serial Printer	20.250.000	23.393.500	(13,44)
Scanner (Peralatan	13.500.000	27.400.000	(50,73)
External/Portable Ha	0	1.480.000	(100,00)
Jumlah Belanja Ko	**165.000.000**	**344.260.200**	(52,07)
Pengembalian	-	-	#VALUE!
Jumlah Belanja	**165.000.000**	**344.260.200**	(52,07)

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2024 AUDITED dan TA 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 AUDITED tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Realisasi TA 2023 AUDITED. Dalam hal ini Kantor Komisi Pemilihan Umum kabupaten Padang Pariaman tidak melakukan penambahan pembangunan gedung kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	**0**	**0**	0,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 AUDITED dan TA 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 AUDITED tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Realisasi TA 2023 AUDITED. Hal ini disebabkan tidak adanya penambahan jaringan teknologi informasi dalam rangka mendukung rencana strategis.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**0,00**
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**0,00**

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainya TA 2024 AUDITED dan TA 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 AUDITED tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Realisasi TA 2023 AUDITED.

Belanja Bantuan Sosial Rp. 0,-

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Kantor Komisi Pemilihan Umum kabupaten Padang Pariaman tidak melakukan belanja bantuan sosial.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
…..	0	0	0,00
…….	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**0,00**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**0,00**

PENJELASAN ATAS PO-POS NERACA

Aset Lancar Rp. 2.401.580.426

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED masing-masing adalah sebesar Rp. 2.401.580.426,- dan Rp.1.371.634.747,-.

Aset Lancar merupakan barang konsumsi yang dapat segera direalisasikan atau dihabiskan untuk dipakai operasional kantor dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan dan Sewa Gudang dibayar dimuka.

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.0,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 DESEMBER 2024 AUDITED dan 31 Desember 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pada Satker KPU Kabupaten Padang Pariaman per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED masing masing adalah Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Uang Tunai	-	-
Bank BRI Cabang Pariaman	-	-
No. Acc 651896561411000		
Jumlah	**-**	**-**

Kas di

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan Rp. 0,-

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah sebesar masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 DESEMBER 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Uang Tunai	-	-
Bank BRI Cabang Pariaman	-	-
No. Acc 032101000315308		
Jumlah	**-**	**-**

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp. 2.401.580.426,-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED masing-masing sebesar Rp. 2.401.580.426,- dan Rp. 0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, Kas Lainnya dan Setara Kas adalah merupakan Dana Hibah Pilkada 2024. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pe	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	2.401.580.426	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	**2.401.580.426**	**-**

Piutang PNBP

Rp. 0,-

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED masing-masing adalah sebesar Rp. 0,-. dan Rp. 0,-. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

Uraian	TH 2024	TH 2023
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Rp. 0,-

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

No	Nama	TH 2024	TH 2023
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		-	-
Jumlah		**-**	**-**

Bagian Lancar TPA

Rp. 0,-

C.6 Bagian Lancar TagihanPenjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

No	Nama	TH 2024	TH 2023
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
Jumlah		**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp. 0,-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Per 31 DESEMBER 2024 AUDITED dan 31 Desember 2023 AUDITED

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan		0%	-
Macet		0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan		0%	-
Macet		0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**-**		**-**

Belanja Dibayar di Muka Rp. 168.750.000,-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED masing-masing adalah sebesar Rp. 168.750.000,- dan Rp. 393.750.000,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

Jenis	TH 2024	TH 2023
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Per	-	-
Pembayaran Sewa Ge	168.750.000	393.750.000
Jumlah	**168.750.000**	**393.750.000**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp. 0,-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang masih harus diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

Jenis	TH 2024	TH 2023
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Persediaan Rp. 0,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp.977.884.747,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Tidak ada perubahan data terhadap persediaan. Rincian Persediaan per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

Jenis	TH 2024	TH 2023
Pesediaan Barang Konsumsi		
Persediaan untuk diserahkab ke	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Persediaan	-	977.884.747
Jumlah	**-**	**977.884.747**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp.0 dan tidak disajikan dalam Persediaan.

Tagihan TP/TGR Rp. 0,-

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang

mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 DESEMBER 2024 AUDITED adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR Per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED

No	Debitur	TH 2024	TH 2023
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		-	-
Jumlah		**-**	**-**

Tagihan Penjualan Angsuran Rp. 0,-

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)per 31 DESEMBER 2024 AUDITED dan 31 Desember 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

No	Debitur	TH 2024	TH 2023
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
Jumlah		**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp. 0,-

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2024 AUDITED

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	**-**		**-**
Tagihan PA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan		0%	-
Macet		0%	-
Jumlah	**-**		**-**
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**-**		**-**

Tanah Rp. 2.266.279.000,-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah sebesar Rp. 2.266.279.000,- dan Rp. 2.266.279.000,-. Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan nilai aset tetap tanah. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	**2.266.279.000**
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2024	**2.266.279.000**

Rincian saldo Tanah per 31 DESEMBER 2024 AUDITED adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2024 AUDITED

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	3.825 m2	Jl. Padang Baru	2.266.279.000
2		-	-
3			-
4			-
Jumlah			**2.266.279.000**

Peralatan dan

C.15 Peralatan dan Mesin

Mesin Rp. 2.994.325,450,-

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah Rp. 2.994.325.450,- dan Rp. 2.711.375.450.,- Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per Januari 2024	**2.994.325.450**
Mutasi tambah:	
Pembelian	165.000.000
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2024	**2.994.325.450**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-2.406.703.569
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**587.621.881**

Gedung dan Bangunan Rp. 1.616.544.000,-

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah Rp. 1.616.544.000,- dan Rp. 1.616.544.000,-. Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan nilai aset Gedung dan Bangunan. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	**1.616.544.000**
Mutasi tambah:	
Pembangunan tambahan ruang kelas	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	**1.616.544.000**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(243.542.299)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**1.373.001.701**

Jalan,Jaringan

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

dan Irigasi Rp. 0,-

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	**-**
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**-**

Aset Tetap Lainnya Rp. 0,-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-.Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2024, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	**0**
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2024	**0**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2024	0
Nilai Buku per 30 September 2024	**0**

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 0,-

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. (2.687.713.914)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah masing-masing Rp. (2.687.713.914),- dan Rp. Rp. (2.389.678.263),- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutanselain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 DESEMBER 2024 AUDITEDadalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

TA 2024 AUDITED

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.994.325.450	-2.406.703.569	587.621.881
2	Gedung dan Bangunan	1.616.544.000	-281.010.345	1.335.533.655
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
5	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		**4.610.869.450**	**-2.687.713.914**	**1.923.155.536**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud Rp. 0,-

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 DESEMBER 2024 AUDITED adalah sebagai berikut:

RincianAset Tak berwujud TA 2024 AUDITED

Uraian	Nilai Perolehan
	0
	0
Jumlah	**0**

Aset Lain-Lain Rp. 0,-

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	**-**
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2024	**-**
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**-**

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya Yang Belum Diregister Rp. 0,-

C.23 Aset LainnyaYang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya Yang Belum Diregister per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp. (0

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah masing-masing Rp. (0,-) dan Rp. (505.629.037,-). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 DESEMBER 2024 AUDITED adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN Rp. 0,-

C.25Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerjadan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp. 0,-

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga I

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

RincianUtang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	-
2	Potongan pajak yang belum disetor	-
3	Utang kepada Pihak ketiga I	-
	Total	**-**

Pendapatan Diterima di Muka Rp. 0,-

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
	-
	-
	-
Total	**-**

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp. 0,-

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar Per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED

Uraian	TH 2024	TH 2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Ekuitas

C.29 Ekuitas

Rp. 6.649.964.962,-

Ekuitas per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 6.649.964.962,- dan Rp. 5.576.154.934-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNBP

Rp. 0,-

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Dsember 2024 dan 2023 AUDITED adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0
Penerimaan Kembali belanja barang Tahun Anggaran yang Lalu	0	0	
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	0

Beban Pegawai Rp. 2.979.120.569,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 2.979.120.569,- dan Rp. 2.673.361.844,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahyang

belum berstatus PNSsebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1.899.481.111	1.075.801.281	77
Beban Tunjangan-tunjangan	1.079.639.458	1.597.560.563	0
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	0
Beban Lembur			0
Jumlah	**2.979.120.569**	**2.673.361.844**	11

Beban Persediaan Rp. 3.540.445.092, -

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 3.540.445.092,- dan Rp. 35.478.650,. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yangdipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 AUDITED adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	0	35.478.650	-100
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	-	0
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-	0
Beban Persediaan Bahan Baku	3.540.445.092	-	0
Beban Persediaan Lainnya	-	-	0
Jumlah	**3.540.445.092**	**35.478.650**	9.879

Beban Barang dan Jasa Rp. 73.165.630.645,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 73.165.650.645,- dan Rp. 20.353.514.276,-. Beban Barang danJasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya kenaikan dari beban bahan, honor output kegiatan dan beban barang non operasional lainnya serta beban jasa profesi dan jasa lainnya. Walaupun sebagian besar beban barang dan jasa mengalami penurunan, terdapat beban Listrik dan jasa Wifi.id yang meningkat karena disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan perkantoran. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan 2023 AUDITED adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TH 2024 dan 2023 AUDITED

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	3.153.000	43.840.500	(92,81
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusa	0	41.000	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	73.066.100	123.000.000	(40,60
Beban Barang Operasional Lainnya	77.052.750	21.175.000	263,89
Beban penyusutan Peralatan dan Mesin	260.567.605	0	#DIV/0
Beban Bahan	433.749.253	2.078.253.765	100,00
Beban Honor Output Kegiatan	29.662.942.000	14.338.850.000	100,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	35.754.168.632	3.091.494.572	1056,53
Penanganan Pandemi CIVID-19	0	0	#DIV/0
Beban Langganan Listrik	26.228.224	47.853.439	(45,19
Beban Jasa Konsultan	94.616.400	0	#DIV/0
Beban Persediaan Bahan Baku	3.540.445.092	0	#DIV/0
Beban Penyusutan Gedung dan Banguna	37.468.046	0	100,00
Beban Sewa	225.000.000	485.850.000	100,00
Beban Jasa Profesi	9.000.000	6.150.000	100,00
Beban Jasa Lainnya	2.966.373.543	117.006.000	100,00
Beban Jasa - Penanganan COVID-19		0	100,00
Beban Jasa Aset Ekstrakomtable Peralata	1.800.000	0	100,00
Jumlah	**73.165.630.645**	**20.353.514.276**	259,47

Beban Pemeliharaan Rp. 115.965.489,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Per 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 115.965.489,- dan Rp. 279.385.032,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya penambahan pada pemeliharaan gedung dan bangunan dan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 AUDITED adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	52.343.750	190.853.135	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	63.621.739	88.531.897	0,00
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaa	0	0	100,00
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	**115.965.489**	**279.385.032**	(58,49

Beban Perjalanan Dinas Rp. 5.656.102.106,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 5.656.102.106,- dan Rp. 1.275.949.007,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untukperjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi dan tahapan Pemilu yang sudah dimulai yang meningkat. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 AUDITED adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	4.282.468.195	511.514.373	737,21
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.046.000	106.820.000	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.127.108.572	177.108.399	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	228.479.339	480.506.235	**-52,45**
Jumlah	**5.656.102.106**	**1.275.949.007**	**343,29**

Beban Barang untuk Diserahkan

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah

kepada Masyarakat Rp. 0,-

masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk STriwulan IIITahun 2024 dan 2023 AUDITED adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	0,00

Beban Bantuan Sosial Rp. 0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 dan 2023 AUDITED adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	**0,00**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 298.035.651,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 298.035.651,- dan Rp. 233.126.626,- Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 AUDITED adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	260.567.605	195.658.580	75,089373
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	37.468.046	37.468.046	100
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	0
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak Diguna	-	-	#DIV/0!
Jumlah Penyusutan	**298.035.651**	**233.126.626**	78,221053
			0
Beban Amortisasi Software	-	-	0
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	0
Jumlah Amortisasi	**-**	**-**	0
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**298.035.651**	**233.126.626**	78

Beban Penyisihan

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang Tak Tertagih Rp.0,-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 AUDITED adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0,00
Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	0,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp. 0,-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0,00
Penjualan Alat Kantor	0	0	0,00
Selisih Kurs	0	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Pers	0	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**0**	**0**	0,00

*)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa

Rp. 0,-

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2024 dan 2023 AUDITED adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNBP	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp. 5.576.154.934,

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 5.576.154.934,- dan Rp. 4.087.372.013,-

Defisit LO (Rp. 85.745.349.552,-)

E.2Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 AUDITED 2023 AUDITED dan 2021 adalah sebesar (Rp. 85.745.349.552,-) dan (Rp. 26.338.673.356,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp. 0,-

E.3.1Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp. 0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	**-**

Selisih Revaluasi Aset TetapRp. 0,-

E.3.3Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Revaluasi Aset tersebut berasal dari revaluasi tanah, bangunan dan pagar milik satker di Jl. Padang Baru No. 11 Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

KoreksiAset Tetap Non Revaluasi Rp. 0,-

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	**-**

Koreksi Lain-Lain Rp. 0,-

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas

pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	**-**

Transaksi Antar EntitasRp. 86.819.159.580,-

E.4Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 DESEMBER 2024 AUDITED DAN 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 86.819.159.580,- dan Rp. 26.338.673.373,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	**-**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga

31 DESEMBER 2024 AUDITED, DDEL sebesar Rp. 0-,- sedangkan DKEL sebesar Rp.0,-.

E.4.2Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 DESEMBER 2024 AUDITED sebesar Rp. 0,-, terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin		-
3	Persediaan		-
	Jumlah		**-**

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 DESEMBER 2024 AUDITED sebesar Rp. 0,-.

E.4.3Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 DESEMBER 2024 AUDITED sebesar Rp. 0,-. dari total Rp. 0,-.

Rincian pengesahan Hibah untuk 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			Rp -
2			Rp -
Total Pengesahan			**Rp -**
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			**Rp -**

Ekuitas Akhir

Rp. 6.649.964.962,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 DESEMBER 2024 AUDITED dan 2023 AUDITED adalah masing-masing sebesar Rp. 6.649.964.962,- dan Rp. 5.576.154.934,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

KPU Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan rekonsiliasi dengan KPPN sesuai Hasil Rekonsiliasi SAKTI-SPAN pada Satker 656141 sampai dengan Periode 2024-12.

Berdasarkan Neraca per 31 Desember Tahun 2024 Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0,- merupakan Uang Muka dari KPPN (UP) KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, Kas Lainnya dan Setara Kas KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah sebesar Rp. 2.401.580.426,- merupakan Kas lainnya di K/L dari Hibah yang belum Disahkan Belanjanya Tahun 2024, Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) sebesar Rp. 168.750.000 merupakan Belanja Sewa Gedung selama 2 Tahun karna belum melakukan Jurnal Balik Belanjanya, berdasarkan Kontrak Sewa Gudang Nomor 18/SPK/1305/X/ 2023 AUDITED tanggal 3 Oktober 2023 AUDITED dan SPM Nomor 00155T tanggal 13 Oktober 2023 AUDITED dengan SP2D Nomor 230101301015977 tanggal 16 Oktober 2023 AUDITED, Persediaan sebesar Rp. 0 merupakan Bahan Baku alat Kelengkapan Pemilu Tahun 2024 yang mana pencatatannya telah diregister.

Adapun Saldo Peralatan dan Mesin per 31 DESEMBER 2024 AUDITED sebesar Rp2.994.325.450,00 dan terdapat mutasi tambah senilai Rp282.950.000,00,- yang merupakan belanja Modal Peralatan dan Mesin di Tahun 2024 adalah berupa :

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan (Rp)	Jumlah Nilai (Rp)
1	Lenovo Yogabook 9 13IMU9 Intel Core Ultra 7 155H/32GB/1TB/W11 + OHS2021 (83FF000GID)	1	41.000.000	41.000.000
2	Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 i5-13420H/16GB/512GB SSD/W11 + OHS2021/14 Inch WUXGA IPS Touch (83KX000YID/83KX0010 ID)	2	15.300.000	30.600.000
3	Asus FA507NVR-R746K6M-OM AMD Ryzen7-7435HS/16GB/1TB*(2x 512GB) SSD/RTX4060 8GB/W11 +OHS2021+M365/15.6 Inch 144Hz	2	20.600.000	41.200.000
4	LED TV 65 Inch SHAPP 4K Frameless Google TV 4T-C65FJ1X+Breaket Standing	1	13.500.000	13.500.000
5	A4 Multifunction Inkjet Printer DCP – T220	4	2.250.000	9.000.000
6	Scanner Dokumen ADS-4700W	1	13.500.000	13.500.000
7	Printer HP OJ 250 Print, Scan,Copy,Wifi	1	7.650.000	7.650.000
8	Printer LX-310	1	3.600.000	3.600.000
9	Mesin absensi Sidik Jari X601	1	4.950.000	4.950.000
	Jumlah			165.000.000

Berdasarkan Berita Acara Nomor 497/KU.02-BA/1305/ 2023 AUDITED tanggal 20 November 2023 AUDITED Tentang Hasil Beauty Contest Pemilihan Bank Mitra Kerjasama untuk Rekening penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024. Dan Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 234 Tahun 2023 AUDITED Tentang Penetapan Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024. Adapun Reward Bank Syariah Indonesia yang diterima oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan BAST tanggal 7 Februari 2024

berupa :

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan (Rp)	Jumlah Nilai (Rp)
1	Samsung Tab S9 12/256	6 unit	15.500.000	93.000.000
2	Keyboard	6 unit	2.500.000	15.000.000
3	Adaptor	6 unit	300.000	1.800.000

Dalam hal ini pencatatan Barang Reward Bank BSI terjadi kesalahan pencatatan di SAKTI yang seharusnya tidak merekam BAST penerimaan Reward Bank ke aplikasi dikarenakan akan berpengaruh Kelaporan keuangan Tahun 2024 yang mana di Neraca tercatat Kewajiban Jangka Pendek yang berbunyi Hibah Yang belum disahkan sebesar Rp. 109.800.000,-. Untuk Laporan Keuangan Keuangan Periode 13 nanti akan dilakukan Jurnal Manual sehingga di Laporan Neraca Tidak berbunyi lagi Hibah Yang Belum disahkan nantinya.

Reward Bank Syariah Indonesia yang diterima oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman adalah sesuai dengan BAST tanggal 28 Agustus 2024 berupa :

	Uraian	Unit	Jumlah
1	Kursi Tamu L Jepara Gajah 221 sudut	1 set	8.100.000
2	Kursi teras Jepara Koin 1,1 Meja	1 set	1.850.000

Pengembalian Belanja per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp. 18.301.528,- dengan rincian adalah sebagai berikut :

1. Pengembalian Belanja Pegawai An. Anisah Nomor NTPN 30B465UFPKA5C4J9, NTB 240418590252, Kode Billing 702404180775529 tanggal 18 April 2024 sebesar Rp. 356.628
2. Pengembalian Honor Pengelola Keuangan dengan Nomor NTPN 63B9F45KQ4LR3B21, NTB 241010418186, Kode Billing 702410101599279

tanggal 10 Oktober 2024, Rp. 6.415.700

3. Pengembalian Honor Pengelola Keuangan dengan Nomor NTPN 5132A397AB77AHKU, NTB 241130026595, Kode Biling 702411301832350 tanggal 30 November 2024, Rp. 129.200
4. Pengembalian belanja barang Operasional lainnya Badan Adhoc KPPS se-Kab Padang Pariaman dengan Nomor NTPN 60C006QT9M7DPf18, NTB 241206053720, Kode Billing 702412061883432 tanggal 6 Desember 2024 Rp.11.400.000,-

Pengembalian Belanja UP dan TUP Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengembalian Belanja Sisa Tambahan Uang Persediaan dengan Nomor NTPN 31AF65UFPO3OTTI5, NTB 240827224880, Kode Billing 702408261367365 tanggal 27 Agustus 2024 Rp. 3.170
2. Pengembalian Belanja Sisa Ganti Uang Persediaan dengan Nomor NTPN 8D0945UFPRP6VO6G, NTB 241220019257, Kode Billing 702412201976016 tanggal 20 Desember 2024. Rp. 62.362
3. Pengembalian Belanja Sisa Tambahan Uang Persediaan dengan Nomor NTPN 1ADD67NAPH18PJ5K, NTB 241231093611, Kode Billing 702412312071348 tanggal 31 DESEMBER 2024 AUDITED Rp. 551.102.703
4. Pengembalian Belanja Sisa Tambahan Uang Persediaan dengan Nomor NTPN C8D3B45KPU3D5Q52, NTB 240304455823, Kode Billing 70240.3040569506 tanggal 4 Maret 2024 Rp.87.700
5. Pengembalian Belanja Sisa Tambahan Uang Persediaan dengan Nomor NTPN 18A6C1GCAHC79DAJ, NTB 240627375766. Kode Billing 702406261093715 Tanggal 27 Juni 2024 Rp. 580.065.053

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01 TAHUN 2024 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang

Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan arang dan Jasa Bagian Anggaran 076 Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : Tres Natalia Situmorang

Pejabat Pembuat Komitmen : Feta Yuni Feria

PejabatPenandatangan/Penguji SPM : Anisah

Bendahara Pengeluaran /Pengelola Keu : Floria

Pengelola Keuangan : Khairunas

Pengelola Keuangan : Kiki Mita Putri

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa : Gustmar

Adapun perubahan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 13 TAHUN 2024 tentang Perubahan keempat atas putusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01 TAHUN 2024 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani Surat

Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan arang dan Jasa Bagian Anggaran 076 Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : Tres Natalia Situmorang

Pejabat Pembuat Komitmen : Feta Yuni Feria

PejabatPenandatangan/Penguji SPM : Junaidi

Bendahara Pengeluaran /Pengelola Keu : Floria

Pengelola Keuangan : Khairunas

Pengelola Keuangan : Abdul Razak

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa : Gustmar